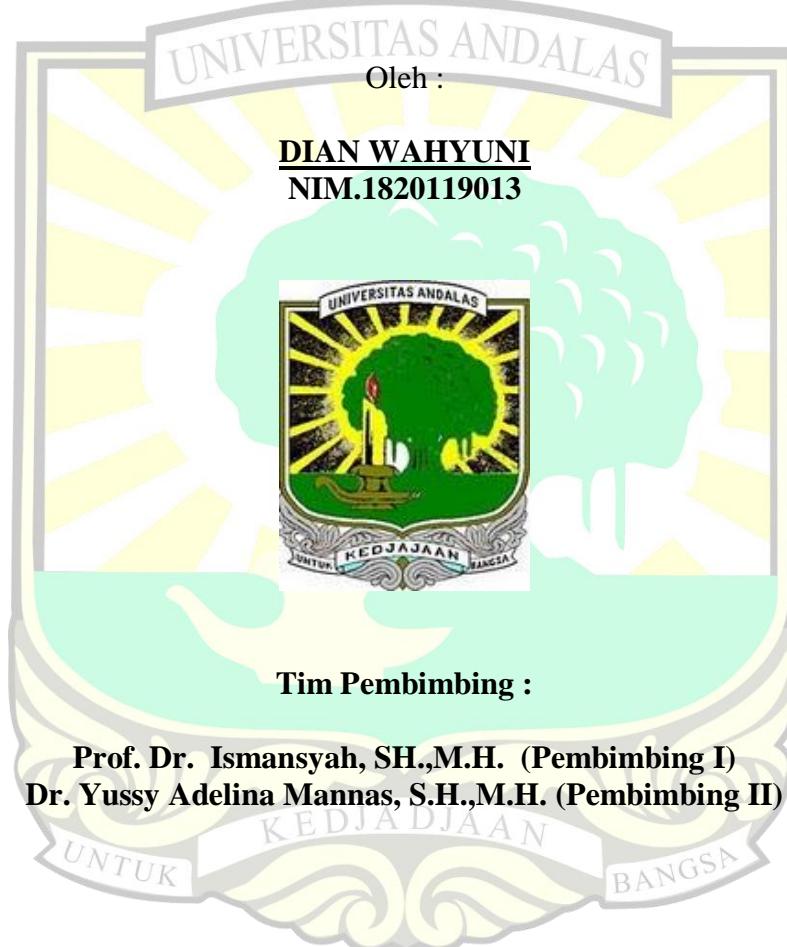


TESIS

JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN GUGATAN PERDATA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan Untuk
Memperoleh Gelar Magister Hukum*



Tim Pembimbing :

Prof. Dr. Ismansyah, SH.,M.H. (Pembimbing I)
Dr. Yussy Adelina Mannas, S.H.,M.H. (Pembimbing II)

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2020**

**JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MENGAJUKAN
GUGATAN PERDATA SEBAGAI UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN
KEUANGAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI
DI WILAYAH HUKUM KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA BARAT**

(Dian Wahyuni, NIM. 1820119013, 2020, 120 halaman)

ABSTRAK

Gugatan perdata dalam Tindak Pidana Korupsi merupakan bentuk penegakan hukum yang dilakukan oleh lembaga Kejaksaan yang diwakili Jaksa Pengacara Negara sebagai upaya pengembalian kerugian keuangan negara. Rumusan masalah penelitian ini adalah (1) Bagaimakah upaya Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? (2) Apa kendala Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? (3) Bagaimana bentuk penyelesaian atas kendala Jaksa Pengacara Negara dalam mengajukan gugatan perdata sebagai upaya pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dimasa mendatang pada wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat? Pendekatan yang digunakan dalam Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat yuridis empiris (*terapan*), yaitu suatu penelitian ilmiah yang melihat bagaimana penerapan aturan hukum khususnya mengenai gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara dan upaya pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini bahwa gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara untuk pengembalian kerugian keuangan Negara merupakan upaya lanjutan setelah instrumen pidana tidak sepenuhnya mengembalikan kerugian keuangan Negara dan upaya negosiasi dengan terpidana atau ahli waris terpidana tidak berhasil. Dalam pelaksanaan gugatan perdata oleh Jaksa Pengacara Negara terkendala oleh tidak diketahui keberadaan terpidana dan juga harta kekayaan terpidana, terpidana telah jatuh miskin, terhadap aset yang disita dan telah dilakukan lelang akan tetapi tidak ada peminatnya dengan alasan lokasi tidak strategis ataupun harga yang terlalu tinggi sehingga tidak bisa untuk pengembalian kerugian keuangan Negara. Strategi kejaksaan untuk pengembalian kerugian keuangan Negara adalah optimalisasi fungsi dan tugas Kejaksaan pada bidang penyidikan dan bidang intelijen. Jaksa Pengacara Negara menghimbau terpidana atau ahli waris terpidana untuk membayar tuggakan uang pengganti, penelusuran harta kekayaan terpidana hingga ke ahli waris, melakukan blokir terhadap harta kekayaan terpidana atau ahli waris jika terpidana meninggal.

Kata Kunci : Jaksa Pengacara, Gugatan, Kerugian Negara dan Korupsi

STATE SOLICITOR'S LAWSUIT AS A RESPONSE TO RESTORE STATE'S FINANCIAL LOSS DUE TO CORRUPTION CRIMINAL ACT IN THE WEST SUMATERA'S PROSECUTOR OFFICE JURISDICTION

(Dian Wahyuni, NIM. 1820119013, 2020, 120 Pages)

ABSTRACT

Civil lawsuits in Corruption Crime is a form of law enforcement carried out by the Attorney General's office, represented by the State Attorney as an effort to recover the losses of state finances. The formulation of the problem of this research are (1) What is the effort of the State Attorney in bringing a civil suit as an effort to recover state losses due to criminal acts of corruption in the West Sumatra Prosecutor's jurisdiction? (2) What is the obstacle for the State Attorney in filing a civil suit as an effort to recover state losses due to corruption in the jurisdiction of the West Sumatra High Prosecutor's Office? (3) What is the form of settlement of the State Attorney Attorney's obstacle in submitting a civil suit as an effort to recover state losses due to corruption in the future in the jurisdiction of the West Sumatra Prosecutor's Office? The approach used in this research is an empirical (applied) juridical legal research, which is a scientific research that looks at how the application of the rule of law, especially regarding civil lawsuits by the State Attorney Attorney and efforts to recover state financial losses due to criminal acts of corruption. The results obtained from this study that the civil lawsuit by the State Attorney for the recovery of state financial losses is a continued effort after the criminal instrument does not fully recover the financial losses of the State and negotiation efforts with the convicted or heirs of the convicted person are unsuccessful. In the implementation of civil lawsuits by the State Attorney Attorney constrained by the unknown whereabouts of the convicted person and also the assets of the convicted person, the convicted person has fallen into poverty, for assets seized and has been auctioned but there are no interested persons on the grounds that the location is not strategic or the price is too high so it does not able to recover the financial losses of the State. The prosecutor's strategy for recovering state financial losses is to optimize the Attorney General's functions and duties in the field of investigation and intelligence. State Attorney calls on the convicted or heir to the convicted person to pay a replacement money, trace the assets of the convicted to the heirs, block the assets of the convicted or heirs if the convict dies.

Keywords: Attorney Attorney, Lawsuit, State Losses and Corruption